

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB TENAGA MEDIS DAN TENAGA KEPERAWATAN DALAM SIRKUMSISI PADA LAYANAN *HOME CARE*

Oleh

EDY RAMDHANI

Praktik sirkumsisi dilakukan di ruang operasi atau klinik atau praktik pribadi bahkan *home care*. Seorang dokter dapat melakukan praktik pribadi apabila memiliki keterampilan klinis. Keterampilan klinis harus terus dikembangkan dari awal hingga akhir sekolah kedokteran. Berdasarkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia, kompetensi dan kewenangan untuk melakukan tindakan sirkumsisi adalah dokter umum. Namun dalam praktik di masyarakat, sirkumsisi dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga oleh perawat terutama pada layanan *home care*. Perawat harus memiliki Surat Tanda Registrasi Perawat (STRP) dan Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) untuk melaksanakan praktik keperawatan yang disertai adanya pelimpahan wewenang dari tenaga medis kepada perawat untuk melakukan praktik kesehatan. Pelimpahan wewenang dari dokter terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya manusia. Pelimpahan wewenang tersebut yang sering menyebabkan adanya kelalaian medis, karena dokter melimpahkan kepada seseorang yang diluar kompetensinya. Kelalaian medis yang terjadi pada praktik sirkumsisi dapat berupa terpotongnya *gland* penis pada saat tindakan atau setelah penyembuhan hasil sirkumsisi tidak maksimal yang menyebabkan kulup tertutup kembali. Untuk kelalaian di atas, pasien memerlukan tindakan medis lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian akan mengkaji mengenai (1) tanggungjawab hukum tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam sirkumsisi pada layanan *home care* dan (2) penegakan hukum terhadap tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam sirkumsisi yang terjadi kelalaian tindakan pada layanan *home care*.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, tanggung jawab tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam sirkumsisi pada layanan *home care* yaitu terdiri dari tanggung jawab menurut ketentuan profesi, yaitu sanksi administratif seperti teguran tertulis dan pencabutan izin praktik oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Selain itu tenaga medis dan tenaga keperawatan menanggung pertanggungjawaban menurut hukum di Indonesia yaitu pidana, perdata, dan administrasi. Kewenangan perawat yang didapat secara delegatif menyebabkan perawat menanggung pertanggungjawaban atas tindakan yang sesuai dengan kompetensi perawat. Jika kewenangan adalah mandat, maka dokter yang memberikan kewenangan akan menanggung pertanggungjawaban. Kemudian, penegakan hukum dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu formulasi (peraturan), penerapan (profesi dan aparatur negara), dan tahapan eksekusi (pemenuhan putusan).

Kata kunci: *home care*; sirkumsisi; tenaga keperawatan; tenaga medis.

ABSTRACT**HEALTH WORKERS AND MEDICAL PERSONNELS' LIABILITY IN-HOME SERVICE CIRCUMCISION****By****EDY RAMDHANI**

Circumcision practices are executed in operating rooms, clinics, private practices, and home care. A doctor can perform a private practice if they have clinical skills. Clinical skills are continuously developed from the beginning to the end medical school. Based on the Indonesian Doctors Competency Standards, the competence and authority to perform circumcision are general practitioners. However, in the community, circumcision is performed not only by doctors but also by nurses, especially in-home care services. Nurses must have a Nurse Registration Certificate and Nurse Practice Permit to perform nursing practice through authority delegation from medical personnel to nurses in health practices. Delegation of authority from doctors occurs due to limited human resources. This delegation of authority often causes medical negligence because doctors delegate it to someone incompetent. Medical negligence in circumcision is cutting the glands penis during the procedure. Negligence also illustrates when circumcision results are not optimal after healing, which causes the foreskin to close again. Of this negligence, the patient requires further medical action. Therefore, this research will examine (1) the liabilities of medical personnel and health workers in circumcision at home care services and (2) law enforcement against medical personnel and health workers in circumcision where negligence occurs in-home care services.

The type of legal research used in this research is normative legal which includes research on legal principles, legal systematics, level of legal synchronization, legal history, and comparative law. The data used in this research is secondary data.

Based on the research discussions', medical personnel and health workers' responsibilities in circumcision at home care services consist of liabilities according to professional provisions, namely administrative sanctions such as written warnings and revocation of licenses to practice by the Honorary Council of Medical Ethics and the Honorary Council of Indonesian Medical Disciplines. In addition, medical and health personnel is also liable according to Indonesian law. This liability includes criminal, civil, and administrative perspectives. The nurse's delegated authority causes the nurse to bear complete responsibility. If authority is a mandate, the doctor who gives the authority will bear responsibility. Law enforcement is carried out through three stages, namely formulation (regulations), application (profession and state apparatus), and stages of execution (fulfillment of decisions).

Keywords: circumcision; nurse; home care; medical personnel.